

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama perdagangan biomassa *Palm Kernel Shell* (PKS) atau cangkang sawit antara Indonesia dan Jepang sepanjang periode 2020-2024. Kerja sama bilateral ini didorong oleh adanya saling ketergantungan dan pemenuhan kepentingan nasional kedua negara, di mana Jepang membutuhkan pasokan biomassa yang stabil untuk menyokong agenda transisi energi hijau pasca bencana nuklir Fukushima, sementara Indonesia memanfaatkan peluang ekspor ini untuk meningkatkan nilai ekonomi limbah industri kelapa sawitnya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, studi ini membedah mekanisme operasional rantai pasok PKS yang melibatkan koordinasi erat antara eksportir lokal di bawah APCASI, fasilitasi promosi dagang oleh JETRO, hingga korporasi importir raksasa di Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kemitraan dagang ini awalnya berjalan sangat produktif, stabilitas perdagangan mengalami guncangan signifikan pada Maret 2024 akibat adanya regulasi pengetatan sertifikasi keberlanjutan internasional (seperti GGL, RSPO, atau ISCC) yang diterapkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI). Kebijakan tersebut bertindak sebagai hambatan perdagangan non-tarif (*non-tariff barriers*) yang menuntut biaya kepatuhan (*compliance cost*) tinggi dan memicu penurunan performa ekspor Indonesia pada akhir tahun 2024. Guna menjaga keberlangsungan kerja sama ini, Pemerintah Indonesia aktif melakukan diplomasi perdagangan (G2G) melalui peninjauan ulang perjanjian IJEPA dan optimalisasi forum IJEF agar sertifikasi domestik ISPO dapat diakui secara setara di Jepang, sementara para pelaku usaha di tingkat hulu terus beradaptasi melakukan penyesuaian standar guna mengamankan stabilitas pasar energi jangka panjang.

Kata kunci: *Palm Kernel Shell* (PKS), perdagangan internasional, biomassa, transisi energi, Indonesia-Jepang.

ABSTRACT

This study aims to analyze trade cooperation in palm kernel shells (PKS) between Indonesia and Japan over the 2020–2024 period. This bilateral cooperation is driven by mutual interdependence and the fulfillment of both countries' national interests: Japan requires a stable supply of biomass to support its green energy transition agenda following the Fukushima nuclear disaster, while Indonesia leverages this export opportunity to enhance the economic value of its palm oil industry waste. Using a qualitative descriptive research method, this study examines the operational mechanisms of the PKS supply chain, which involves close coordination between local exporters under APCASI, trade promotion facilitated by JETRO, and major import corporations in Japan. The research findings indicate that although this trade partnership was initially highly productive, trade stability suffered a significant setback in March 2024 due to stricter regulations on international sustainability certification (such as GGL, RSPO, or ISCC) implemented by Japan's Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI). These policies acted as non-tariff barriers that imposed high compliance costs and triggered a decline in Indonesia's export performance by the end of 2024. To maintain the sustainability of this cooperation, the Indonesian government is actively engaging in government-to-government (G2G) trade diplomacy by reviewing the IJEPA agreement and optimizing the IJEF forum so that the domestic ISPO certification can be recognized as equivalent in Japan, while upstream business actors continue to adapt and adjust their standards to ensure long-term energy market stability.

Keyword: *Palm Kernel Shell (PKS), international trade, biomass, energy transition, Indonesia-Japan.*